

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Perubahan dalam aspek dan pola kehidupan serta nilai kehidupan manusia mengisyaratkan bahwa manusia dihadapkan pada tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Penyesuaian terhadap berbagai perubahan akan membawa berbagai implikasi diantaranya meningkatnya tuntutan dan kebutuhan hidup manusia. Menghadapi tuntutan dan kebutuhan yang semakin meningkat pada akhirnya manusia dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan untuk merencanakan hidup yang lebih baik serta memperoleh kelestarian ditengah perkembangan tersebut.

Upaya mewujudkan manusia yang kreatif dan mandiri dalam menghadapi tantangan kehidupan menuntut dunia pendidikan yang secara konseptual merupakan upaya membantu individu-individu untuk mengembangkan dirinya, harus memperhatikan hakekat insani secara integral dalam setiap layanan. Dengan demikian individu pada akhirnya memiliki kompetensi-kompetensi dalam menjawab tantangan perkembangan baik kompetensi pribadi, profesional, kemasyarakatan maupun relegius. Dalam Undang undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 1 disebutkan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang".

Sebagai usaha sadar pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Selanjutnya pada pasal 4 Undang undang No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam hal ini pendidikan menjadi andalan utama dalam mewujudkan atau menghasilkan profil manusia Indonesia menurut perspektif undang-undang sistem pendidikan nasional yang telah dikemukakan diatas. Rumusan diatas memberikan pengertian bahwa segala upaya pendidikan merupakan upaya optimasi dengan memperhatikan sifat-sifat kemanusiaan secara integral sehingga mampu menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kompetensi-kompetensi manusiawi.

Manusia yang memiliki ciri-ciri kualitas seperti tersebut dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989 merupakan manusia yang telah mencapai taraf manusiawi dan dalam rangka pemikiran di Indonesia merupakan ciri kualitas manusia yang diharapkan mampu menghadapi perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Oleh karena itu perhatian yang sangat mendasar dan akan mampu menjawab tantangan dan peluang dimasa depan adalah kualitas sumber daya manusia.

Sudarja Adiwikarta (1988:114), bahwa Pengalaman akan adanya perubahan dalam tuntutan dan kondisi lingkungan yang semakin pesat itu menyebabkan lahirnya pengakuan bahwa pendidikan orang dewasa dan mereka yang tidak lagi mengikuti pendidikan formal itu bukan saja perlu melainkan bahkan tak dapat diabaikan dan karenanya merupakan suatu keharusan.

Pengakuan tersebut telah menyebabkan lahirnya perubahan yang bersifat mendasar dan revolusioner dalam dunia pendidikan yaitu 1) Pendidikan tidak lagi dianggap hanya terbatas di sekolah dan perguruan tinggi saja, 2) Sejalan dengan yang pertama tadi, masyarakat dituntut agar menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan lanjutan bagi mereka yang telah meninggalkan lembaga pendidikan formal atau yang sama sekali tidak memperolehnya; 3) Sistem pendidikan formal dituntut untuk mengadakan reorganisasi sehingga memungkinkan lahirnya lulusan yang mampu belajar secara mandiri, gemar akan belajar dan mau serta menggali sumber-sumber belajar yang diperlukan; 4) Pendidikan formal bukan saja mengajarkan berbagai ilmu dan ketrampilan, melainkan juga cara-cara belajar mandiri tanpa guru (learning how to learn).

Keadaan tersebut sekaligus memberikan indikasi bahwa dalam sub sistem pendidikan luar sekolah diperlukan perencanaan yang mantap. Suatu perencanaan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, demikian halnya pada perencanaan pelatihan pamong belajar. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, diperlukan keikutsertaan pamong belajar secara langsung dalam penyusunan perencanaan pelatihan mulai dari penggalian, perumusan masalah dan potensi, penentuan prioritas masalah, serta perumusan rencana yang akan dilaksanakan.

Hal itu berarti perencanaan yang disusun mengacu pada pertimbangan strategis mengenai kebutuhan masyarakat, penentuan skala prioritas, perhitungan biaya, waktu belajar dan penetapan sasaran yang akan dicapai. Untuk itu setiap perencana program pendidikan luar sekolah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sudah selayaknya mampu menciptakan program yang dapat 1) mendorong terciptanya

partisipasi peserta 2) memberikan keuntungan langsung kepada peserta 3) berorientasi pada kerja nyata 4) tepat waktu 5) berorientasi pada kepentingan keluarga 6) memenuhi kebutuhan semua pihak 7) menggunakan metode belajar orang dewasa.

Perubahan yang dipelopori oleh lembaga pendidikan secara sistematis dan terarah membutuhkan waktu, biaya, tenaga dan sumber-sumber lain, hal ini tentunya membutuhkan perencanaan yang baik, yakni suatu perencanaan yang menyangkut lembaga pendidikan sebagai suatu kesatuan termasuk organisasinya, strukturnya, personalianya, programnya dan sumber-sumber pendidikan lainnya. Setiap perubahan yang terjadi dimasyarakat akan menjadi tantangan bagi organisasi untuk mengatasinya, demikian juga perubahan dan perkembangan dalam bidang teknologi membawa dampak yang sangat besar kepada organisasi. Oleh karena itu pada setiap perubahan yang terjadi baik yang datang dari masyarakat maupun teknologi, organisasi tersebut akan menyesuaikan dirinya. Untuk menghadapi dan menjawab perubahan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satu diantaranya adalah melalui pelatihan. *

Sedangkan kegiatan pelatihan pada hakekatnya adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman atau perubahan sikap dan ketrampilan agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaan saat ini dan saat mendatang dengan lebih baik (Simamora, 1995:287).

Sebagian besar program pelatihan dimaksudkan untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan kinerja, nampak dalam bentuk ketidak cocokan antara perilaku aktual dan perilaku yang diinginkan. Jika seorang karyawan tidak berprestasi pada level yang diharapkan atau terjadi penyimpangan pelaksanaan maka program-program pelatihan diusulkan sebagai upaya pemecahan masalah.

Dalam suatu organisasi baik pemerintah maupun industri, pelatihan diperlukan agar para pelaksana dapat membantu pimpinan mencapai maksud dan tujuan instansi yang dipimpinnya. Pelatihan akan berhasil dalam mengemban misi organisasi hanya apabila para pengelola pelatihan memperhatikan prinsip dasar dan karakteristik andragogi, kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pelatihan. Pelatihan diselenggarakan karena adanya kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan industri atau lembaga pelatihan dengan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperuntukkan bagi para pekerja/manager/karyawan/pegawai untuk menghadapi tugas yang semakin kompleks dan bervariasi.

Pamong Belajar merupakan ujung tombak Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga dalam merencanakan, melaksanakan dan membina kegiatan belajar pendidikan luar sekolah perlu ditingkatkan kemampuannya secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan citra pendidikan luar sekolah dalam menghadapi tuntutan tugas dan masyarakat. Pamong belajar selain orang yang langsung berhubungan dengan sasaran layanan pendidikan luar sekolah, juga sebagai penentu dalam mengimplementasikan dan memadukan keseluruhan program Diklusepora baik secara horizontal maupun vertikal. Mereka juga menjadi penyeimbang antara kebutuhan yang datang dari atas maupun yang datang dari masyarakat itu sendiri. Disisi lain mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan para siswa, mereka adalah orang dewasa, yang merupakan ciri khusus peserta pelatihan.

Oleh sebab itu penyelenggaraan pelatihan pamong belajar harus menerapkan prinsip dasar andragogi. Terdapat lima kelompok sasaran yang menjadi target penyelenggaraan pelatihan yakni : 1) pencari kerja adalah mereka yang sudah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu, 2) para siswa yang keluar sebelum menyelesaikan studinya dan belum mendapatkan pekerjaan, 3) pegawai baru yang membantu menyesuaikan dengan tugas dan situasi baru , 4) pegawai yang sudah lama bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja dan penyesuaian dengan adanya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi baru, 5) pegawai untuk pengembangan dan perluasan organisasi dimasa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Ketenagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga dari tingkat pusat sampai daerah mempunyai peranan yang strategis dalam mengemban visi dan misi pendidikan luar sekolah "*unggul dalam kreativitas dan prima dalam pelayanan masyarakat*". Oleh karena itu tak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas ketenagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (Ditjen Diklusepora).

Pamong Belajar yang merupakan salah satu tenaga diklusepora yang berada di daerah adalah ujung tombak pelaksana teknis yang diberi tugas secara profesional dalam hal menyuluh dan mendidik masyarakat melalui program-program pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga. Fakta yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa pamong belajar belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Pelatihan pamong Belajar perlu mendapatkan perhatian dan keseriusan agar dapat menghasilkan tenaga pamong belajar yang profesional. Pamong Belajar ini perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhannya, hal ini penting mengingat keberhasilan proses pembelajaran yang tepat dan efektif merupakan faktor dominan di dalamnya.

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, bahwa pelatihan pamong belajar yang telah dilaksanakan belum optimal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pola pelatihan yang diterapkan selama ini belum memadai untuk menjawab permasalahan pekerjaan dan perkembangan program Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga yang semakin cepat dan beraneka ragam dalam melayani kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan perencanaan pelatihan yang baik, dengan demikian perencanaan pelatihan menjadi penting artinya agar dana, tenaga, pikiran, waktu yang dialokasikan benar-benar didayagunakan seoptimum mungkin untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya.

Melakukan perencanaan bukanlah pekerjaan yang mudah, merencanakan sesuatu membutuhkan keahlian termasuk perencanaan pelatihan pamong belajar, mereka bekerja atas dasar data yang diperoleh di lapangan, namun data yang diperoleh terkadang tidak lengkap. Kelemahan cara kerja seperti ini menimbulkan keragu-raguan para perencana apakah hal itu masih dapat dipertahankan. Apakah data yang relevan, baru, lengkap, representatif dapat diperoleh dengan cara survey. Apalagi perencanaan yang mencakup daerah yang luas, kesempurnaan data yang diperoleh sangat diragukan, bila data seperti ini dipakai sebagai bahan perencanaan hanya akan memberikan perencanaan yang global yang bersifat garis besarnya saja.

Dengan demikian didalam kegiatan perencanaan partisipatif terdapat aspek-aspek yang melibatkan semua personalia, lembaga pendidikan dan masyarakat melalui wakil-wakilnya mulai dari kegiatan penentuan kebutuhan sampai perencanaan itu berhasil, aspek-aspek tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Demikian halnya pada perencanaan pelatihan pamong belajar akan melibatkan tim pengembang program, panitia pelatihan, fasilitator, peserta pelatihan dan unsur-unsur terkait lainnya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut “ *Bagaimanakah Penerapan Model Perencanaan Partisipatif Bagi Efektivitas Pencapaian Tujuan Pelatihan Pamong Belajar SKB (Studi Kasus di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Jawa Barat?)*”

Permasalahan tersebut di atas akan dijawab dengan hasil penelitian berdasarkan pokok-pokok pertanyaan penelitian sebagaimana yang disusun dibawah ini :

1. Bagaimanakah penerapan perencanaan partisipatif pada penyusunan perencanaan pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan oleh BPKB ?
2. Bagaimanakah penerapan perencanaan partisipatif pada pelaksanaan pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan oleh BPKB?.
3. Bagaimanakah penerapan perencanaan partisipatif pada evaluasi pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan oleh BPKB?
4. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi penerapan perencanaan partisipatif pada pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan oleh BPKB?

Permasalahan pokok tersebut merupakan acuan yang perlu dibahas secara rinci sehingga dapat memberikan gambaran tentang penerapan perencanaan partisipatif pada pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan oleh BPKB Jawa Barat.

D. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat serta terhindar dari kemungkinan salah interpretasi dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional dari beberapa istilah yang berkenaan dengan judul dan fokus permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan adalah suatu penentuan urutan tindakan, perkiraan biaya serta penggunaan waktu untuk suatu kegiatan didasarkan atas data dengan memperhatikan prioritas yang wajar dengan efisiensi untuk tercapainya tujuan (Suherman dkk, 1988:82). Sedangkan menurut Made Pidarta (1990), kata partisipatif berasal dari kata partisipasi yang artinya pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.

Dengan demikian yang dimaksud perencanaan partisipatif dalam penelitian ini adalah perencanaan yang melibatkan peserta pelatihan, Tim Pengembang Program, panitia pelatihan, fasilitator dan unsur terkait lainnya pada pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan oleh BPKB Jawa Barat.

2. Perencanaan Pelatihan

Perencanaan merupakan langkah awal dari kegiatan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan program. Dror dalam Schoorl (1982:287) mendefinisikan "Planning is the process of preparing a set of decisions for action in the future, directed at achieving goals by optimal means".

Perencanaan adalah proses dalam menyiapkan seperangkat keputusan mengenai tindakan dikemudian hari, yang ditujukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan cara-cara yang optimal. Menurut Djudju Sudjana (1992:41), perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dikatakan sebagai proses yang sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu di dalam proses pengambilan keputusan, menggunakan pengetahuan dan teknik secara ilmiah serta kegiatan yang terorganisasikan. Penentuan urutan tindakan disini adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam merencanakan pelatihan dan perlu diketahui lebih dulu, untuk siapa pelatihan tersebut dan apa kebutuhan belajarnya.

Sedangkan pelatihan adalah suatu upaya memperbaiki kinerja karyawan dimasa kini maupun dimasa depan dengan meningkatkan kemampuan karyawan untuk bekerja melalui pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan (Randall:1987).

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa yang dimaksud perencanaan pelatihan dalam penelitian ini adalah suatu proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan teknik secara ilmiah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki pamong belajar dalam melaksanakan tugas pokoknya.

3. Penerapan Model Perencanaan Partisipatif

Istilah model sudah sering dipakai orang baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta maupun organisasi. Apakah dia seorang ahli pendidikan, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli politik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991:662), disebutkan model bisa berarti pola, acuan, contoh, ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.

Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia (jilid 4), dijelaskan bahwa model merupakan kata pengecil dari modo yang berarti sifat, cara dan representasi diperkecil dari suatu benda atau keadaan yang dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan atau menemukan sifat-sifat bentuk aslinya.

Berdasarkan pengertian model di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud penerapan model perencanaan partisipatif dalam penelitian ini adalah upaya yang sistematis dan disengaja yang dilakukan tim pengembang program dengan mengikut sertakan peserta pelatihan, panitia pelatihan, fasilitator dalam kegiatan perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada pelatihan pamong belajar SKB yang diselenggarakan BPKB Jawa Barat.

4. Evaluasi Program Pelatihan.

Rencana evaluasi program pelatihan merupakan bagian dari perencanaan pelatihan yang harus dilaksanakan bilamana kita ingin merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu pelatihan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai, membandingkan sudah sejauhmana program dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ruchyi Subekti (1986:3) evaluasi adalah proses penentuan, pengumpulan, pengolahan serta penggunaan informasi yang diperlukan untuk melakukan pertimbangan sebelum membuat keputusan.

Dari pengertian evaluasi diatas ada tiga unsur pokok yang erat kaitannya satu sama lain yakni :

- a. Keputusan adalah tujuan akhir suatu evaluasi, keputusan didefinisikan sebagai suatu alternatif tindakan yang dipilih.

- b. Pertimbangan adalah hasil akhir proses evaluasi, yang merupakan penafsiran terhadap informasi yang diperoleh. Pertimbangan dapat menggambarkan suatu keadaan sekarang atau perkiraan dimasa depan.
- c. Informasi merupakan bahan pokok yang diperlukan untuk melakukan pertimbangan. Informasi diperoleh dengan berbagai cara, misalnya memberikan tes, angket, observasi, skala bertingkat dan sebagainya. Prosedur mana yang diperoleh tergantung pada informasi apa yang diperlukan untuk suatu keputusan.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana tujuan suatu program kegiatan yang telah dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan suatu program kegiatan.

Adapun yang dimaksud evaluasi program pelatihan dalam penelitian ini adalah evaluasi internal pelatihan terhadap input, proses, output dalam rangka meningkatkan rencana program pelatihan pamong belajar berikutnya sehingga pelatihan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang positif bagi pamong belajar SKB maupun BPKB Jawa Barat.

5. Faktor Pendukung

Pendukung berasal dari kata dukung yang berarti membuat sesuatu (pekerjaan atau perjalanan) menjadi lancar. Dalam penerapan perencanaan partisipatif pada pelatihan pamong belajar juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung. Yang dimaksud faktor pendukung dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan penerapan perencanaan partisipatif pada pelatihan pamong belajar dapat terselenggara dengan baik.

6. Faktor Penghambat

Penghambat berasal dari kata hambat yang berarti membuat sesuatu (pekerjaan atau perjalanan) menjadi tidak lancar, hambat juga berarti menekan. Dalam penerapan perencanaan partisipatif pada pelatihan pamong belajar juga tidak terlepas dari beberapa hambatan. Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat penerapan perencanaan partisipatif pada pelatihan pamong belajar.

7. Pamong Belajar

Pamong Belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pamong belajar SKB yaitu pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyuluh dan mendidik warga belajar melalui pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 127/MENPAN/1989, Tanggal, 27 Nopember 1989, Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang memiliki Jenjang Jabatan dan kepangkatan mulai :

- a) Assisten Pamong Belajar Muda (II/a), Assisten Pamong Belajar Madya (II/b), Assisten Pamong Belajar (II/c), Ajun Pamong Belajar Muda (II/d)
- b) Ajun Pamong Belajar Madya (III/a), Ajun Pamong Belajar (III/b), Pamong Belajar Pratama (III/c), Pamong Belajar Muda (III/d)

- c) Pamong Belajar Madya (IV/a), Pamong Belajar Utama Pratama (IV/b), Pamong Belajar Utama Muda (IV/c).

8. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar merupakan unit pelaksana teknis kegiatan belajar Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki wilayah kerja propinsi dan berkedudukan di Propinsi (Keputusan Mendikbud RI No. 022/O/1997 Tanggal, 20 Pebruari 1997).

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, bimbingan dan uji coba program pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga berdasarkan kebijaksanaan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

BPKB yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BPKB Jawa Barat yang berkedudukan di Jayagiri Bandung dengan wilayah kerja meliputi propinsi Jawa Barat.

E. TUJUAN PENELITIAN.

1. Tujuan Umum.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan model perencanaan partisipatif pada pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan oleh BPKB.

2. Tujuan Khusus.
 - a. Mengungkap dan mendiskripsikan penerapan perencanaan partisipatif pada penyusunan perencanaan pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan BPKB.
 - b. Mengungkap dan mendiskripsikan penerapan perencanaan partisipatif pada pelaksanaan pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan BPKB.
 - c. Mengungkap dan mendiskripsikan penerapan perencanaan partisipatif pada evaluasi pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan BPKB.
 - d. Mengungkap dan mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan perencanaan partisipatif pada pelatihan pamong belajar yang diselenggarakan BPKB.

F. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna setidaknya ada dua manfaat baik secara konseptual teoritis maupun dapat diterapkan secara praktis di lapangan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi konsep penerapan perencanaan partisipatif dalam pelatihan pamong belajar, dalam rangka meningkatkan sumber daya, memperkaya dan mempertajam konsep pembelajaran pendidikan luar sekolah.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, baik bagi pengelola maupun memberikan pedoman pengelola program-program kegiatan pendidikan luar sekolah yaitu :

1. Para perencana PLS sebagai masukan, dalam rangka menyusun suatu pola kegiatan program khususnya pelatihan pamong belajar.
2. Para pendidik PLS sebagai masukan dalam rangka menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan teori-teori manajemen perencanaan pelatihan.
3. Para pengambil keputusan dilingkungan PLS dalam rangka penyusunan strategi dan pola penyelenggaraan manajemen PLS bagi masyarakat khususnya pamong belajar.

G. KERANGKA PEMIKIRAN.

Beberapa dasar pemikiran proses perencanaan pelatihan adalah proses atau alur pemikiran untuk perencanaan suatu pelatihan. Pemikiran untuk perencanaan ditentukan oleh wawasan perencana dan alasan-alasan yang digunakan baik yang berupa asumsi atau fakta.

Asumsi atau fakta ini akan menjadi dasar atau titik tolak pemikiran, kemudian dasar-dasar pemikiran ini akan mewarnai perencanaan pelatihan yang dihasilkan. Agar perencanaan pelatihan pamong belajar mencerminkan obyektifitas, rasionalitas, dan sistematis, maka perlu diperhatikan beberapa pemikiran ini.

Dasar-dasar pemikiran ini berfungsi sebagai pedoman atau alur semata, karena isi konkrit dari perencanaan pada akhirnya ditentukan oleh wawasan, kemampuan dan selera para perencana atau pembuat keputusan.

1. Masalah dan kebutuhan.

Untuk ini ada tiga pertanyaan dasar yang harus dijawab :

- a. Adakah masalah dan kebutuhan, serta tepatkah dipecahkan melalui pelatihan ?
- b. Bagaimana menemukan masalah dan kebutuhan itu ?
- c. Apa prioritas kebutuhan yang tepat dan harus segera dipenuhi melalui pelatihan ?

2. Tujuan dan Kurikulum Pelatihan.

Untuk ini ada lima pertanyaan dasar yang harus dijawab yaitu:

- a. Apa tujuan pelatihan yang hendak dicapai ?
- b. Bagaimana pola pengembangan kurikulum pelatihannya ?
- c. Metode pelatihan apa yang tepat digunakan sesuai dengan tujuan dan isi pelatihan ?
- d. Media apa yang harus digunakan untuk memudahkan penyampaian isi pelatihan ?
- e. Bagaimana teknik penilaian keberhasilannya dan kapan saja harus dilakukan ?

3. Sumber daya penyelenggaraan pelatihan.

Untuk ini ada empat pertanyaan dasar yang harus dijawab.

- a. Adakah unsur manusia yang disyaratkan untuk terlibat dalam proses pelatihan (peserta, fasilitator, panitia) ?
- b. Adakah sumber dana yang dapat didayagunakan untuk pelatihan
- c. Adakah material (alat, bahan, tempat) yang dapat digunakan ?
- d. Adakah waktu dan tempat untuk penyelenggaraan pelatihan ?

4. Pengorganisasian pelatihan.

Untuk ini ada tiga pertanyaan dasar yang harus dijawab yaitu:

- a. Bagaimana proses pelatihan akan dilaksanakan ?
- b. Bagaimana pembagian tugas antara unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan ?
- c. Ketentuan apa yang harus dibuat dan diterapkan agar proses pelatihan berjalan lancar ?

5. Pengorganisasian proses perencanaan pelatihan.

Untuk ini ada tiga pertanyaan dasar yang harus dijawab yaitu:

- a. Apa saja tahapan dan kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis dalam perencanaan pelatihan ?
- b. Siapa saja yang akan berperan didalamnya ?
- c. Kapan dan dimana kegiatan-kegiatan itu harus dan tepat dilaksanakan ?



